

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2024 telah dapat tersusun. Penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 ini, merupakan gambaran yang akan dijadikan pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam menjalankan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran 2024, sehingga apa yang direncanakan dalam upaya terwujudnya Visi Jambi 2021-2026, yaitu "JAMBI MANTAP" yang berarti "JAMBI LEBIH MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT".

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kami berupaya sempurnakan Renja tahun 2024, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka melengkapi serta menyempurnakan dokumen Renja Tahun 2024, besar harapan kami semoga dokumen Renja Tahun 2024 dapat bermanfaat untuk kita semua.

Di akhir kata semoga dokumen Rencana Kerja yang telah disusun dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Jambi, Januari 2024
KEPALA BADAN,

Drs. H. APANI SAHARUDIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19680603 198810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 8

 3.1 Tujuan dan Sasaran 8

 3.2 Strategi dan Kebijakan 10

 3.3 Program/Kegiatan dan Sasaran yang ingin dicapai 11

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2024 12

BAB V PENUTUP 22

LAMPIRAN - Realisasi Anggaran Tahun 2023

 - Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun, Pedoman Renja Tahun 2024 ini di atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah. Sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) Tahun. Renja OPD berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis selama lima Tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tercantum visi dan misi Pemerintah Jambi menuju Jambi MANTAP. Untuk pencapaian target dari kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan Rencana Kerja yang merupakan langkah awal OPD untuk mendesain Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam Rencana Kerja, yang tertuang dalam pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah adalah :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu.
2. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD
4. Dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2024 ini disusun dengan mempedomani :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Renja Pembangunan Daerah tahun 2014.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017.
9. Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.
12. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2024 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat penjelasan latar belakang, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dan capaian renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik tahun berjalan, hasil evaluasi mengacu pada hasil laporan kinerja.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rencana program dan kegiatan tujuan, kelompok sasaran dan usulan program dan kegiatan pada Tahun 2024.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.

BAB IV : PENUTUP

Memuat kata penutup atas rencana kerja perangkat daerah Tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk memberikan, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, gambaran umum program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja meningkatnya predikat SAKIP dalam pelaksanaan pelayanan dan jasa penunjang lainnya yang mempunyai 7 kegiatan.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan 1 kegiatan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan rincian 1 kegiatan.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja persentase melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan rincian 1 kegiatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan rincian 1 kegiatan.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial indikator kinerja persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan rincian 1 kegiatan.

Dalam pelaksanaan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi per 31 Desember 2023 yang dialokasikan sebesar Rp. 102,378,640,807,- terealisasi sebesar Rp. 100.531.127.002,- atau 98,20%, dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM		KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI	
				(Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207,246,220	206,377,579	99,58
		2 Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,387,707,572	6,991,788,635	94,64
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38,500,000	38,500,000	100
		4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	631,520,481	631,067,264	99,93
		5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234,377,860	232,167,600	99,06
		6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	368,422,670	365,102,053	99,10
		7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,170,172,800	1,159,260,227	99,07
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	9,623,944,150	8,680,211,262	90,19
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	78,438,123,004	78,434,008,454	99,99
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,680,000,000	1,650,930,920	98,27
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	331,067,050	300,045,550	90,63
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,267,559,000	2,141,713,008	94,45

Penjabaran sasaran yang ditetapkan dalam 6 (enam) program yang diuraikan dalam 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat dalam bidang Administrasi Perkantoran dan layanan lainnya.

Dalam upaya mencapai tujuan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat sehingga dapat dilayani dan di fasilitasi dengan baik sesuai dengan

kebutuhan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

PROGRAM 1	SASARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Tersusunnya program kegiatan dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
	2. Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
	3. Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor.
	4. Terpenuhinya komponen listrik kantor.
	5. Terselenggaranya rapat-rapat.
	6. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.
	7. Terakomodirnya bahan bacaan media cetak.
	8. Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik di lingkungan kantor.
	9. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.
	10. Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI sehingga dapat memiliki Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang kuat. Untuk mencapai tujuan diatas, maka disusun program dan sasaran sebagai berikut :

PROGRAM 2	SASARAN
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terwujudnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Supaya tujuan ini dapat tercapai, maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

PRORGRAM 3	SASARAN
------------	---------

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Terlaksananya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
--	--

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Guna mencapai tujuan dimaksud, maka ditetapkan program dan sasaran sebagai berikut :

PROGRAM 4	SASARAN
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

PROGRAM 5	SASARAN
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Terwujudnya peningkatan ketahanan Ekososbud, Fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika serta fasilitasi KUB dan penghayat kepercayaan

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

PROGRAM 6	SASARAN
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing/TKA/Lembaga asing serta penanganan konflik di daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari misi Gubernur Jambi yang terpilih. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu sampai dengan lima tahunan.

Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2024 melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung oleh rakyat (Rapat Pleno KPU Provinsi Jambi) pada tanggal 3 Juni 2021. Dimana Al Haris-Abdullah Sani meraih suara terbanyak dan dilantik pada tanggal 12 Juli Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia.

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2021 – 2026 adalah:

“TERWUJUDNYA JAMBI LEBIH MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT, (JAMBI MANTAP)”

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026 antara lain:

MISI PERTAMA : **Memantapkan Tata Kelola Pemerintah**

Yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung egovernment yang terintegrasi.

MISI KEDUA : **Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah**

Yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan komoditas unggulan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

MISI KETIGA : **Memantapkan Kualitas SDM**

Yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan Pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Ketiga Misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Jambi yang Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi Ketiga** Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

"Memantapkan Kualitas SDM"

Dari misi ketiga tersebut, sasaran yang ingin di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah Melalui Kerukunan Antar Suku dan Antar Umat Beragama. Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu:

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Serta di Dukong oleh Program-Program yang lain.

Dalam rangka pengembangan misi guna mencapai visi yang telah dikemukakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026, yaitu :

" Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang dinamis "

Untuk mendukung tujuan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026, yaitu :

1. Terwujudnya Situasi Politik Daerah Yang Kondusif.
2. Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis.

3.2 Strategi dan Kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang serta dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2021-2026 Menuju Jambi MANTAP. Pada tabel dibawah disajikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Visi : Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridha Allah SWT.			
Misi 3 : Memantapkan kualitas SDM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang dinamis	Terwujudnya demokrasi yang dinamis	Mengembangkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan.	Revitalisasi FKUB sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh Agama, Masyarakat dan pemerintah.

Pada tabel diatas, telah tergambar dengan jelas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang tertuang dalam visi dan misi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menjabarkan dalam 3 (tiga) misi dimana masing- masing misi dijelaskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Misi 3 : yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam kerukunan intra dan antar umat beragama, Indeks Aspek Kebebasan Sipil serta penguatan rencana aksi gangguan keamanan dalam Provinsi Jambi.

3.3 Program / Kegiatan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran dan target capaian kinerja dari instansi pemerintah yang maksimal baik kerjasama dengan masyarakat maupun Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Visi dan Misi yang diinginkan. Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai 6 program dengan 12 kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Mempunyai 7 kegiatan terdiri dari 18 sub kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya persentase pelayanan administrasi perkantoran dan layanan lainnya.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
Mempunyai 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dengan sasarannya adalah Terwujudnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
Mempunyai 1 kegiatan terdiri dari 3 sub kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Terlaksananya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
Mempunyai 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang memiliki sasaran yaitu terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekososbud
Mempunyai 1 kegiatan terdiri dari 2 sub kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi KUB dan penghayat kepercayaan.
6. Program Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
Mempunyai 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan yang sasarannya adalah Terwujudnya peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing/TKA/Lembaga asing serta penanganan konflik di daerah serta forum koordinasi pimpinan daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2024 mengacu pada Renstra OPD, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan Bangsa dan Politik, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai gambaran umum program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.1 Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - 1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD.
 - 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2 Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah.
 - 1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - 1.2.2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1.4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 1.4.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- 2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - 2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - 2.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - 2.1.3 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
3. Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
 - 3.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan dan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - 3.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan dan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. Program Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - 4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - 4.1.1 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - 4.1.2 Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 4.1.3 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. Program Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
 - 5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - 5.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - 5.1.2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. Program Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - 6.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
 - 6.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

- 6.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 6.1.3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 6.1.4 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

Melalui 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari setiap program dan kegiatan Tahun 2024 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jambi disusun secara spesifik, realistis dilengkapi dengan indikator Kinerja dan target capaian kinerja yang terukur sehingga dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan, target kinerja dan sasaran kegiatan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu Program Kegiatan.

Program yang telah ditetapkan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk mengukur input dan output perlu indikator yang jelas setiap kegiatan, karena Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capai kinerja suatu program atau kegiatan.

Kelompok Sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2024 dapat dijabarkan dalam 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan sebagaimana daftar dibawah ini :

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Jambi

BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				163,768,687,590				
8,01	BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI				163,768,687,590				
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Prov. Jambi		9,749,715,590				
8 01 01 1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			175,000,000				
8 01 01 1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Jambi	12 dokumen	15.072.000	APBD		14 dokumen	110.000.000
8 01 01 1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Jambi	12 laporan	159.928.000	APBD		14 laporan	235.000.000
8 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,080,223,849				
8 01 01 1.02.0001	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Jambi	60 orang	7.936.738.184	APBD		70 orang	8.500.000.000
8 01 01 1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Jambi	12 dokumen	143.485.665	APBD		16 dokumen	290.000.000
8 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			102,000,000				
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Prov. Jambi	85 paket	65.000.000	APBD		85 paket	52.000.000

8 01 01 1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov. Jambi	10 orang	37.000.000	APBD		14 orang	35.000.000
8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah			318,939,558				
8 01 01 1.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Jambi	1 paket	29.901.648	APBD		1 paket	35.000.000
8 01 01 1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov. Jambi	1 paket	43.350.000	APBD		1 paket	55.000.000
8 01 01 1.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Jambi	1 paket	47,310,000	APBD		1 paket	70.000.000
8 01 01 1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prov. Jambi	12 dokumen	14.000.000	APBD		12 dok	23.600.000
8 01 01 1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Jambi	4 laporan	184,377,910	APBD		4 laporan	400.000.000
8 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			154,938,831				
8 01 01 1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov. Jambi	24 unit/buah	154,938,831	APBD		22 unit	220.000.000
8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TersediaJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			487,920,562				
8 01 01 1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Jambi	1 laporan	5.550.000	APBD		1 laporan	23.000.000
8 01 01 1.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Jambi	4 laporan	174,363,742	APBD		4 laporan	140.00.000
8 01 01 1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Jambi	4 laporan	308.006.820	APBD		4 laporan	65.000.000
8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			430,692,790				
8 01 01 1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prov. Jambi	20 unit	273,200,000	APBD		20 unit	320.000.000
8 01 01 1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov. Jambi	40 unit	39.500.000	APBD		50 unit	90.000.000

8 01 01 1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Jambi	2 unit	117.992.790	APBD		2 unit	300.000.000
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TERSUSUNNYA PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prov. Jambi		4,910,172,000				
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI			4,910,172,000				
8 01 02 1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Prov. Jambi	4 dokumen	3,754,554,400	APBD		4 dokumen	250.000.000
8 01 02 1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Jambi	300 orang	969,617,600	APBD		400 peserta	400.000.000
8 01 02 1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Jambi	6 laporan	186.000.000	APBD		7 laporan	370.000.000
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	TERSUSUNNYA PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			146,060,800,000				
8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksana Kebijakan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			146,060,800,000				

8 01 03 1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Jambi	400 orang	145.440.120.800	APBD		500 orang	3.500.000.000
8 01 03 1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Jambi	85 orang	560,457,700	APBD		500 orang	350.000.000
8 01 03 1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Jambi	11 laporan	60,221,500	APBD		13 laporan	200.000.000
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	TERSUSUNNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			1,222,000,000				
8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			1,222,000,000				
8 01 04 1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	4 dokumen	247,583,200	APBD		4 dokumen	380.000.000
8 01 04 1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi Dan Mediasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Jambi	75 Ormas	929,570,000	APBD		125 Ormas	1.350.000.000

8 01 04 1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Jambi	4 Lap	44,846,800	APBD		11 Kab/kota	210.000.000
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	TERSUSUNNYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			336,000,000				
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitas KUB dan penghayat kepercayaan			336,000,000				
8 01 05 1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Prov. Jambi	4 dokumen	247.219.560	APBD		6 dokumen	180.000.000
8 01 05 1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Jambi	250 Orang	88.780.440	APBD		3 orang	560.000.000
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	TERSUSUNNYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1,490,000,000				
8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1,490,000,000				

8 01 06 1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Jambi	100 orang	800.000.000	APBD		100 orang	620.000.000
8 01 06 1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Jambi	20 orang	100.000.000	APBD		20 orang	100.000.000
8 01 06 1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Jambi	11 laporan	100.000.000	APBD		11 laporan	30.000.000
8 01 06 1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prov. Jambi	10 dok	490.000.000	APBD		10 dok	1.500.000.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, tersaji dalam suatu perencanaan yang tersusun secara sistematis dan menganut Asas Kepatutan sehingga dalam menyusun DPA-SKPD diharapkan mampu mencerminkan OUTPUT dan INPUT Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2024.

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2024 salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2024
KEPALA BADAN,

Drs. H. APANI SAHARUDIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19680603 198810 1 001